KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bamus tentukan nasib angket: konsistensi sikap fraksi-fraksi di DPR dipertaruhkan
Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Bamus Tentukan Nasib Angket

Konsistensi Sikap Fraksi-fraksi di DPR Dipertaruhkan

JAKARTA, KOMPAS – Nasib hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah DPR, Kamis (18/5). Kandas atau berlanjutnya pembentukan panitia angket KPK bergantung pada konsistensi enam (dari total 10) fraksi yang menolak hak angket.

Enam fraksi penolak angket sebelumnya menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk masuk dalam panitia angket. Keenam fraksi itu adalah Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Tiga fraksi lainnya (PDI-P, Hanura, dan Nasdem) akan mengirim anggota, sementara satu fraksi, yakni Golkar, belum menentukan sikap.

"Setelah Rapat Paripurna DPR pembukaan masa sidang besok (hari ini) akan digelar rapat Bamus DPR. Bamus akan membahas kelanjutan hak angket terhadap KPK," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto, Rabu (17/5), di Jakarta.

Rapat Bamus yang dihadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan Dewan akan membahas apakah panitia angket tetap bisa dibentuk jika ada fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya. Jika tidak dapat dibentuk, dibahas pula apakah hal itu kemudian membuat hak angket gugur.

Menurut Agus, belum pernah terjadi di DPR setelah angket disetujui, ada fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya masuk dalam panitia angket. Oleh karena itu, DPR perlu membahasnya.

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur, keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi. Aturan serupa tertuang pada Pasal 171 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Hingga saat ini, lanjut Agus, pihaknya belum menerima satu pun nama anggota yang dikirimkan fraksi untuk menjadi panitia angket. "Hingga hari ini (kemarin) belum ada satu pun," lanjutnya.

Tetap kirim nama

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, setelah melalui kajian, pihaknya memutuskan akan tetap mengirim anggotanya ke panitia angket. Pasalnya, panitia angket tetap dapat dibentuk meski Gerindra dan fraksi lainnya tidak mengirim perwakilan: "Dengan situasi ini, kami justru rugi jika tidak mengirim utusan," kata Sodik.

Sodik menampik fraksinya berubah pikiran. Langkah mengirimkan anggota ke pantiia angket justru dilakukan agar bisa mengawal perkembangan pembahasan materi di panitia angket.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, meminta fraksi-fraksi penolak angket untuk konsisten. Bentuk konsistensi ditunjukkan dengan tidak mengirimkan nama anggotanya ke panitia angket. Ronald mendesak fraksi-fraksi itu mengembalikan usulan angket itu agar kembali dibahas di Rapat Paripurna DPR. Hal ini karena rapat persetujuan angket di Paripurna, akhir April lalu, bermasalah.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf juga berharap agar fraksi-fraksi tidak hanya melakukan politik pencitraan dengan menolak angket. Apalagi, konsistensi sikap fraksi-fraksi penolak angket menjadi penentu gugur tidaknya panitia angket KPK. Panitia angket tidak akan memiliki dasar legalitas dan keabsahan politik jika dibentuk dengan tidak diwakili semua unsur fraksi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tidak dapat menolak apabila angket terus berjalan. "Hak angket itu haknya DPR. Kami, kan, tidak mungkin menolak. Biarkan mekanismenya berjalan. Apa yang dikehendaki DPR akan kami jawab sepanjang tidak melanggar koridor hukum," ujarnya.

Angket DPR diusulkan setelah KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani. Miryam disebut mendapatkan tekanan dari anggota Komisi III DPR untuk tidak bersaksi dalam kasus KTP elektronik.

(APA/AGE/IAN)